

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan desa Pepelegi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yang dapat dilihat dari proses perencanaan, pertanggung jawaban, pelaporan APB Desa yang selalu mengikuti sertakan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan langkah desa pepelegi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas . Informan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, kaur perencanaan dan Bendahara. Dengan teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berasal dari survei pegawai balai desa, survei kebijakan desa pepelegi dan melakukan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sesuai pasal 2 pengelolaan keuangan desa harus secara transparan, akuntabel dan partisipatif, desa pepelegi sudah transparan dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran desa dan akuntabel dalam proses perencanaan anggaran desa. Namun dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa tidak memiliki hambatan, namun dalam ahur penyusunan memiliki hambatan berkaitan dengan pagu anggaran pemerintah yang tidak turun sesuai dengan tahapannya.

Kata kunci : Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRACT

This research aimed to find out whether the implementation of transparency and accountability principles had been applied by Pepelegi Village in its Village Revenue and Expenditure Budget. It could be seen from planning, accountability, and reporting which involved the villagers.

The research was descriptive-qualitative. It described the steps in the implementation of transparency and accountability principles. Moreover, the informants were the Head Villager, head of planning, and treasurer. The instruments in the data collection technique were interviews, observations, and documentation. Furthermore, the data analysis technique started with a survey from employees of the village hall, a survey of the village policy, and doing analysis.

The result concluded that Pemendagri Number 20, 2018 about Village Financial Management in the second article showed the management had to be transparent, accountable, and participative in the process of Village Budget Management. On the other hand, the process of arrangement had some burdens related to the Government budget limit since it was not suitable for the planning.

Keywords: Transparency Principle, Accountability Principle, Village Revenue and Expenditure Budget

I certify that this translation is true
and accurate, Prepared by a
professional translator. This
translation is provided on this day

M. S. P. M.Pd
STIESIA Language Center
Menur Pumpung No. 1, Samarinda 60118, Indonesia